





SEJARAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kabupaten Tanah Bumbu, merupakan Kabupaten yang masih tergolong muda khusunya di Wilayah Provinsi Kalimantan selatan dan Indonesia pada umumnya, karena pada Februari 2018 yang lalu baru saja merayakan Hari jadinya yang ke 15. Begitupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten tanah Bumbu yang sebelumnya bernama Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) ynag terbentuk pada tahun 2008 dengan berdasar Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, telah diubah dengan Perda No. 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2007 Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dan hingga akhirnya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Perda No. 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan tugas pokok sebagaimana tertuang pada, Perbup No. 37 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tatakerja Unsurunsur Organisasi Dinas PMPTSP.

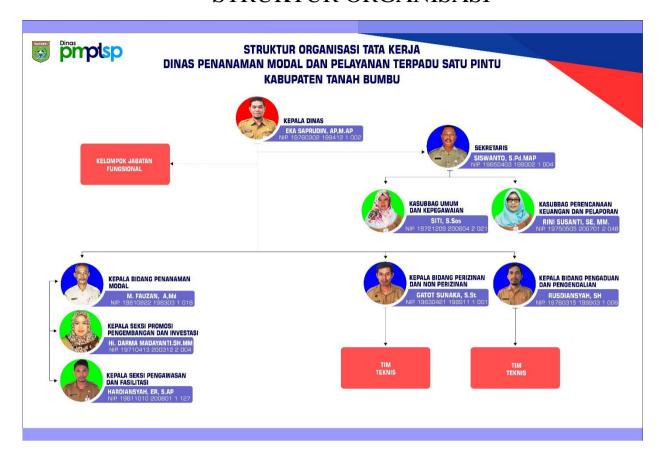
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang di kepalai oleh <u>Eka Saprudin, AP, M.A.P</u>. Pembina Utama Muda NIP. 19760302 199412 1 002 menjadi Dinas yang memiliki kinerja baik dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah. Hal ini dibuktikan dengan inovasi-inovasi yang tiada henti dari bawahan di bawah kepemimpinannya. Setiap bidang memiliki porsi kerjanya masing-masing namun dengan menerapkan "Bersatu Kita Bisa" menjadikan setiap bidang kompak dalam memecahkan masalah yang dihadapi Dinas.







STRUKTUR ORGANISASI



Terdapat beberapa kepala bidang pada Dinas Kami:

- 1. Kepala Dinas PMPTSP
- 2. Sekretaris
 - SUBBAG Umum dan Kepegawaian
 - SUBBAG Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
- 3. Bidang Penanaman Modal
 - Seksi Promosi Pengembangan dan Investasi
 - Seksi Pengawasan dan Fasilitasi
- 4. Bidang Perizinan dan Non Perizinan
 - Tim Teknis SKPD Terkait Perizinan
- 5. Bidang Pengaduan dan Pengendalian
 - Tim Teknis SKPD Terkait





- Merumuskan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Menetapkan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3. Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang penanaman modal;
- 4. Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 5. Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatandibidang pengaduan dan pengendalian;
- 6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait;
- 7. Membina dan mengoordinasikan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 8. Mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;
- 9. Mengoordinasikan dan membina tim teknis;
- 10. Mengoordinasikan dan membina unit pelaksana teknis;
- 11. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- 12. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.



